



පළාත පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමස්ත පළාත පාලන ආයතන
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
රජයේ සේවයේ සහ සමාජ සේවයේ
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රජයේ සේවයේ සහ සමාජ සේවයේ
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> Pos-el: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Tim Kerja	: Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Outcome Program	: 82.85 Nilai
Nama Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Hasil Kegiatan	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Hasil Kegiatan	: 82.85 Nilai
Nama Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Output Sub Kegiatan	: 1 Laporan

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
12. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
13. Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023).

B. Gambaran Umum :

Ketika fase Pengendalian Manajemen masuk pada ranah teknis pelaksanaan, maka menjadi penting untuk memahami dinamika dalam penganggaran dan aktivitas pelaksanaan anggaran yang tercermin dari implementasi pelaksanaan program/kegiatan. Penyusunan anggaran merupakan faktor penting yang harus dibahas secara matang dan penerapannya harus optimal. Untuk memastikan perencanaan anggaran dalam program/kegiatan tahun yang akan datang, diperlukan sebuah tindakan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Kondisi yang terjadi dalam tataran implementasi adalah masih terdapat program/kegiatan yang kerap kali tumpang tindih antara program pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk menghindari hal tersebut, terjadi dan guna menitikberatkan aspek keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan antar sektor dan antar wilayah sehingga terciptanya sebuah sinergitas dan perencanaan yang efektif dan efisien, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi berupaya untuk meningkatkan jalur koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

II. Penerima Manfaat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

III. Strategi Pencapaian

A. Metode Pelaksanaan

Dalam rangka melaksanakan aktivitas untuk pencapaian keluaran dilakukan dengan metode swakelola yang terdiri dari kegiatan/strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan monitoring ke desa dalam rangka uji petik pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
2. Melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan ke Kabupaten/Kota.

3. Melaksanakan rapat evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan dengan Bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

B. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Waktu untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 12 bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025 (Triwulan I, II, III, IV).

- a. Pelaksanaan kegiatan monitoring ke desa dalam rangka uji petik pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan ke kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Nopember 2025
- b. Pelaksanaan rapat koordinasi program/kegiatan/sub kegiatan dengan Bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dilaksanakan pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV pada tahun berkenaan/berjalan.

IV. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu Pencapaian sasaran kegiatan adalah dalam tahun berkenaan/berjalan tahun 2025.

V. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan sebesar **Rp 263.205.012,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Dua Belas Rupiah)** diperuntukkan untuk:

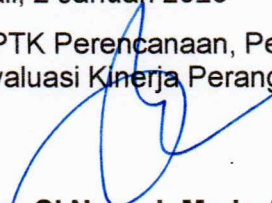
1. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Materai sebesar Rp 9.147.700,- (Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
2. Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp 107.177.312,- (Seratus Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) dipergunakan untuk membayar Honorarium Tenaga Administrasi yang berjumlah 3 orang yang menunjang pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp 146.880.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

dipergunakan untuk rangka supervisi, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 2 Januari 2025

PPTK Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si

Pembina Tk.I

NIP 19710601 199301 1 003

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025						
Urusan	:	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	:	2.13.2.12.2.14.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Sub Unit Organisasi	:	2.13.2.12.2.14.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Program	:	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan	:	2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	:	2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi Kegiatan	:	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Kelompok Sasaran	:	Aparatur, Pemerintah Desa				
Jumlah 2024	:	Rp	292.429.020			
Jumlah 2025	:	Rp	263.205.012			
Jumlah 2026	:	Rp	415.000.000			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator		Indikator				Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82,85 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp 263.205.012	
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	
Hasil	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				82,85 Nilai	
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					263.205.012
5.1	BELANJA OPERASI					263.205.012
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					263.205.012
5.1.02.01	Belanja Barang					9.147.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.147.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					5.108.700
	#ASB-006 (Evaluasi Capaian Kinerja)					
	(-) Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja terkait Program Kegiatan DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali					
	Lem Uhu Stick 21 Gr Uhu	2	Buah	36.900		73.800
	No. 10-1M Kenko	12	Buah	6.200		74.400
	Stopmap Bufalo Biola Biasa	30	Buah	6.200		186.000
	Trigonal Clip No. 3 Atom	12	Kotak	11.800		141.600
	Binder Klip per box Re-Type	12	Box	21.200		254.400
	Spesifikasi : Tinta	15	Buah	291.900		4.378.500
	Tinta Printer 003, T 6642, T 6643, T 6644, T 6641 Epson					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover					2.068.800
	#ASB-006 (Evaluasi Capaian Kinerja)					
	(-) Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja terkait Program Kegiatan DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali					
	Kertas HVS A4 70 gr Sinar Dunia	24	Rim	86.200		2.068.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -BahanCetak					1.640.500
	#NON ASB					
	Fotocopy Hitam Putih Biasa	3.281	Lembar	500		1.640.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya					329.700
	#ASB-006 (Evaluasi Capaian Kinerja)					
	(-) Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja terkait Program Kegiatan DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali					
	Materai 10.000	21	Lembar	15.700		329.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.02	Belanja Jasa					107.177.312
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					98.889.952
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					98.889.952
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20	Orang /Bulan	2.996.561		59.931.220
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12	Orang /Bulan	2.996.561		35.958.732
	THR Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	3	Orang/Tahun	1.000.000		3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					8.287.360
5.1.02.02.02.005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					4.221.600
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	20	Orang/Bulan	131.925		2.638.500
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12	Orang/Bulan	131.925		1.583.100
5.1.02.02.02.006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					230.144
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	20	Orang/Bulan	7.192		143.840
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12	Orang/Bulan	7.192		86.304
5.1.02.02.02.007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					287.680
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	20	Orang/Bulan	8.990		179.800
	Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12	Orang/Bulan	8.990		107.880
5.1.02.02.02.010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					3.547.936
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	20	Orang/Bulan	110.873		2.217.460
	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Pegawai Non ASN	12	Orang/Bulan	110.873		1.330.476
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					146.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					146.880.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					146.880.000
	#NON ASB					
	(-) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali					146.880.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : BALI	306	Orang/Hari	480.000		146.880.000
GRAND TOTAL						263.205.012

PPTK Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
Pembina Tk.I
NIP 19710601 199301 1 003